

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk pemrosesan data, yang melibatkan pemrosesan, perolehan, kompilasi, penyimpanan, dan pemrosesan data untuk memperoleh informasi yang berkualitas tinggi, relevan, dan akurat (Wardiana et al., 2002). Perkembangan teknologi informasi di zaman modern mendorong manusia untuk beradaptasi dengan bantuan teknologi informasi di segala lini kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sudah mulai diterapkan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kehidupan bisnis, kesehatan, dan salah satunya adalah bidang administrasi pemerintahan (*e-government*).

E-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disini diartikan sebagai penggunaan sumber daya sistem informasi untuk membuat sistem administrasi yang lebih efisien, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, memfasilitasi publik untuk akses ke informasi yang luas, dan membuat administrasi yang transparan kepada publik (Satriya et al., 2006). Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Presiden Republik Indonesia Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang, 2003). Penggunaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sudah digaungkan oleh pemerintah pusat melalui diterbitkannya Perpres no 95 Tahun 2018.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu fokus pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital pada sistem pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Perpres no 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah juga mengatur tentang panduan arsitektur SPBE secara nasional dengan tujuan menghasilkan SPBE yang terpadu secara nasional. Adapun domain arsitektur SPBE secara nasional

mencakup domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur keamanan, dan domain arsitektur layanan.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik perlu diawasi dan dievaluasi. Sehingga diterbitkan PermenPANRB no 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemantauan serta evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pencapaian penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE, serta meningkatkan pelayanan publik oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Kualitas penerapan SPBE bisa dilihat dari nilai indeks predikat penilaian SPBE sebagai berikut.

Table I-1 Tabel Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 s.d 5,0	Memuaskan
2.	3,5 s.d < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 s.d < 3,5	Baik
4.	1,8 s.d < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik saat ini tengah didorong penerapannya di berbagai bidang, salah satunya administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan menjadi salah satu pelayanan yang krusial diselenggarakan bagi suatu negara kepada masyarakatnya sebagai perwujudan jaminan hukum serta perlindungan hak setiap individu penduduk. Perlindungan yang dimaksud adalah berupa penerbitan dokumen kependudukan seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan), Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan akta pencatatan sipil lainnya (Jai et al., 2016). Selain itu, pelayanan ini juga menjadi pusat dari pelayanan lainnya seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial, dan lain-lain (Wiryanto A A Lembaga & Negara, 2020).

Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu kabupaten di Indonesia turut menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan indeks 2,37 dengan predikat cukup.

Table I-2 Indeks SPBE Kab. Lombok Tengah

Indeks SPBE – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	2,37 (Cukup)
Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek	
Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,37
Domain Kebijakan SPBE	1,90
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	1,90
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perancangan Strategis SPBE	1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggaraan SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,38
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50

Dalam laporan hasil evaluasi SPBE Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar aspek seperti Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK masih belum mencapai target yang diharapkan. Dalam hal perencanaan strategis, Peta Rencana SPBE belum mencakup seluruh referensi dan domain arsitektur serta mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE. Adapun seluruh Proses Bisnis terkait SPBE yang ada belum didokumentasikan secara formal dan mengikuti pedoman yang berlaku serta proses bisnis yang ada perlu terus-menerus

dilakukan inovasi dan perbaikan. Belum adanya kegiatan dan pengaturan detail terkait pengadaan Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra yang wajib dipatuhi oleh setiap unit kerja yang ada. Dan tim Koordinasi SPBE yang telah ditetapkan belum diberikan tugas/program kerja secara formal agar benar-benar melaksanakan program kerjanya yang dikoordinasikan ke seluruh unit kerja.

Berdasarkan kondisi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tersebut, diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Lombok Tengah supaya bisa mencapai target indeks SPBE sebesar 2,6 dengan predikat Baik. Supaya hal ini bisa terjadi, diperlukannya sinergi di antara seluruh pihak baik kepala pemerintahan dan kepala dinas terkait di Kabupaten Lombok Tengah, serta pemerintah pusat agar bisa meningkatkan penyelenggaraan SPBE.

Isu terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini menjadi salah satu isu yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang harus diselesaikan sebagaimana ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 guna tercapainya misi pemerintah daerah “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih” yaitu mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok tahun 2021-2026, masih terdapat beberapa permasalahan terkait administrasi dan pendaftaran penduduk untuk mencapai misi pelayanan umum pemerintah yang mudah, cepat dan bersih, antara lain yaitu :

1. Belum semua masyarakat wajib KTP yang memiliki KTP, yaitu dari 747.929 orang wajib KTP pada tahun 2019 baru 681.774 orang (91,5%) yang sudah memiliki KTP.
2. Belum semua data kependudukan bisa diakses secara luas oleh masyarakat karena masih berfokus pada pengembangan layanan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dinas terkait yang bertugas menangani segala pelayanan administrasi kependudukan masyarakat mulai dari pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk hingga saat ini terus meningkatkan kinerjanya guna membantu pemerintah daerah mewujudkan visi dan misinya. Hingga kini, kinerja dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sudah berada level 2 dilihat dari indikator ketercapaian kinerjanya. Untuk bisa mencapai level 3, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah perlu melakukan beberapa hal seperti meningkatkan perekaman E-KTP, meningkatkan capaian KIA, meningkatkan akses data, dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Dilihat dari apa yang harus dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan masih menjadi satu proses yang perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu dengan menjalin hubungan kerjasama dalam rangka memanfaatkan data kependudukan.

Berdasarkan permasalahan serta kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dalam peningkatan sistem pemanfaatan data kependudukan, diperlukan adanya perancangan Arsitektur Enterprise pada sistem informasi terkait pelaksanaan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang bisa mendefinisikan arsitektur bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur infrastruktur.

Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada perancangan Arsitektur *Enterprise* yang meliputi domain arsitektur bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur layanan, dan domain arsitektur infrastruktur dengan menggunakan framework kerja TOGAF 9.2 pada sistem informasi pemanfaatan data kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada sasaran misi pemerintah daerah “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kebutuhan proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menggunakan metode TOGAF 9.2?
2. Bagaimana rancangan *Blueprint* Arsitektur Enterprise pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan?
3. Bagaimana rancangan IT Roadmap sebagai acuan implementasi rancangan Arsitektur Enterprise pada proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisis kebutuhan proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
2. Melakukan perancangan *Blueprint* Arsitektur Enterprise pada proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menganalisis dan merancang *IT Roadmap* sebagai acuan implementasi rancangan Arsitektur Enterprise proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian tugas akhir ini :

1. Analisis dan perancangan arsitektur enterprise pada program pengelolaan informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

2. Penelitian ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. Domain yang ada pada penelitian ini mencakup 5 domain yaitu domain arsitektur bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur layanan, dan domain arsitektur infrastruktur (tidak termasuk kemandirian) menggunakan pendekatan TOGAF 9.2 dan untuk domain arsitektur layanan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
3. Perancangan Arsitektur Enterprise ini menggunakan kerangka kerja TOGAF 9.2 yang terdiri dari *Preliminary Phase, Architecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture, Opportunities and Solution*, dan *Migration Planning*

I.5 Manfaat Penelitian

Melalui proses penelitian ini yang dilakukan secara teoritis dan fakta di lapangan, diharapkan bisa memberikan manfaat yang bisa diperoleh berbagai pihak seperti :

1. Membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk menganalisis kebutuhan proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
2. Membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan perancangan *Blueprint* Arsitektur Enterprise proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
3. Membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan perancangan IT *Roadmap* sebagai acuan implementasi rancangan Arsitektur Enterprise untuk memenuhi kebutuhan pada proses pengelolaan informasi administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, bisa memberikan referensi dalam melakukan analisis perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.